

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bencana banjir telah menjadi permasalahan umum yang terjadi di Indonesia khususnya pada musim hujan dan melanda rata-rata wilayah di negara ini. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Strategi Internasional Pengurangan Risiko Bencana (UNISDR), Indonesia adalah negara yang paling rawan terhadap bencana di dunia dengan menduduki peringkat enam untuk bencana banjir. Tingginya posisi Indonesia ini dihitung dari jumlah manusia yang terancam risiko kehilangan nyawa bila bencana alam terjadi (Hendro Kusumo, 2020).

Banjir merupakan fenomena ketika air menggenangi area yang biasanya kering dalam jangka waktu tertentu. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan iklim, urbanisasi yang pesat, dan penebangan hutan yang turut memperburuk situasi sehingga mengakibatkan meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir di Indonesia (Rosyidie, 2013).

Banyaknya bencana banjir yang terjadi di Indonesia memberikan dampak yang sangat negatif, terutama berupa kerugian bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Selain dampak lingkungan, banjir juga berdampak signifikan terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan yang sering kali kehilangan harta benda, sumber penghidupan, dampak psikologis, krisis kesehatan, dan bahkan yang paling parahnya adalah kematian. Kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat banjir

semakin memperumit permasalahan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada stabilitas ekonomi, politik, dan sosial. Oleh karena itu, dalam konteks ini, mitigasi bencana merupakan salah satu bentuk jawaban yang sangat perlu dilakukan dalam upaya penanganan permasalahan banjir yang kerap terjadi.

Pernyataan diatas sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang mendefinisikan mitigasi bencana sebagai salah satu cara atau tindakan yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun melalui kesadaran dan keterampilan untuk menghadapi bencana.

Secara klimatologi, Provinsi Jambi beriklim tropis seperti yang terjadi tiap tahunnya. Provinsi Jambi mengalami curah hujan yang bervariasi mulai dari sedang hingga sangat tinggi. Adapun rata-rata curah hujan di Provinsi Jambi sebagaimana pada dua tahun terakhir adalah 150-400 mm/bulan (Amalia, 2023).

Sungai Batanghari yang mengalir hampir di seluruh wilayah Provinsi Jambi, kian mengalami peningkatan tinggi muka air khususnya selama musim penghujan dengan tingginya dinamika intensitas curah hujan di Provinsi Jambi, mengakibatkan ditetapkan status darurat bencana hidrometeorologi di wilayah Provinsi Jambi (Rizki Amalia, 2024).

Tabel 1.1 Data Daerah Terdampak Banjir Provinsi Jambi 2024

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1.	Kerinci	17	129
2.	Sungai Penuh	7	46
3.	Bungo	16	86
4.	Tebo	9	74
5.	Batang Hari	8	53

6.	Muaro Jambi	6	75
7.	Sarolangun	5	55
8.	Merangin	11	34
9.	Tanjab Timur	2	15
10.	Kota Jambi	8	31
	Total	89	598

Sumber: BPBD Provinsi Jambi

Dilihat dari banyaknya Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi yang terdampak banjir, Gubernur Jambi menyampaikan bahwa banjir yang terjadi pada tahun 2024 menjadi banjir yang terbesar dalam 10 tahun terakhir dan menghasilkan berbagai kerugian yang dialami oleh masyarakat terdampak banjir. Adapun kerugian materil dan nonmateril yang dilaporkan dari total 226.033 korban banjir, yaitu mencakup 22.971 rumah, 59 tempat ibadah, 65 fasilitas kesehatan, 342 fasilitas pendidikan dan 2.859 lahan pertanian milik penduduk dari empat Kabupaten/Kota yang terendam banjir sehingga mengalami berbagai kerusakan pada hasil panennya. Hal tersebut tentunya berpengaruh sangat besar bagi kehidupan masyarakat sebab, sejumlah warga yang terdampak banjir harus terpaksa menggunakan perahu untuk beraktivitas di luar rumah (Al Munanda Ferdi, 2024).

Berkenaan dengan urgensi diatas, maka hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang tertulis pada Pasal 40, bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menetapkan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai yang meliputi salah satunya yaitu kawasan rawan bencana banjir. Sehingga pemerintah daerah diwajibkan untuk dapat mengendalikan pemanfaatan kawasan rawan bencana di daerah dengan melibatkan adanya partisipasi dari masyarakat.

Wakil Gubernur Jambi dalam sambutannya pada kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) menekankan akan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengatasi permasalahan banjir yang tidak dapat dipecahkan hanya dengan pendekatan sektoral, melainkan membutuhkan sinergitas dan kolaborasi multi sektor. Dari terjalinnya kolaborasi tersebut, diharapkan adanya kontribusi dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan para ahli yang nantinya menghasilkan solusi dalam pengelolaan ekosistem dan pengurangan dampak banjir secara efektif di Provinsi Jambi (Yuliana, 2024).

Kota Jambi, yang terletak di Provinsi Jambi menjadi salah satu wilayah yang termasuk dalam kategori daerah rentan terhadap ancaman banjir dengan sejumlah wilayahnya berada dalam zona risiko tinggi. Curah hujan tinggi dan kondisi geografis juga turut memperburuk situasi, menyebabkan banjir ini tidak terjadi hanya sesekali saja, melainkan terjadi pada setiap musim penghujan tiba.

Tabel 1.2 Jumlah Wilayah Terdampak Banjir di Kota Jambi Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
Danau Teluk	5	46	4.179	13.681
Pelayangan	6	44	4.136	28.913
Danau Sipin	3	99	9.411	30.478
Telanaipura	4	77	8.819	30.078
Jambi Timur	5	79	9.141	28.913
Pasar Jambi	4	58	3.645	11.225
Jelutung	2	37	2.954	9.366
Palmerah	1	37	4.517	15.022
Total	31	477	46.820	152.253

Sumber: *Paparan Mitigasi Banjir, 2024*

Berdasarkan data diatas, yang menunjukkan bahwa pada tahun 2024, tercatat sebanyak 8 kecamatan dan 31 kelurahan terdampak banjir, dengan total

152.253 jiwa yang terpengaruh, menegaskan bahwa banjir bukan hanya masalah lingkungan semata, tetapi juga persoalan sosial yang memerlukan perhatian serius dalam upaya mitigasi di Kota Jambi. Dengan banyaknya jumlah jiwa yang terdampak, banjir menyebabkan gangguan signifikan pada pemukiman, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi warga. Dampak sosial banjir yang begitu luas dan signifikan menuntut Pemerintah terkait yang berwenang untuk memperkuat upaya mereka dalam pemetaan dan identifikasi wilayah rawan banjir secara lebih komprehensif. Pemerintah Kota Jambi pada awalnya mengidentifikasi 19 titik banjir dan genangan, terutama di daerah dengan drainase kurang optimal atau dataran rendah. Seiring waktu, beberapa titik mulai membaik, tetapi berdasarkan informasi terbaru sebarannya justru meluas menjadi 83 titik. Berkenaan dengan hal itu, maka terlihat jelas bahwa pertumbuhan urbanisasi dan perkembangan kota menjadi salah satu faktor utama penyebab banjir di wilayah perkotaan (Parmadi et al., 2020). Ditambah pula dengan Kota Jambi yang berfungsi sebagai pusat ekonomi, pemerintahan, budaya serta sosial bagi wilayah sekitarnya, sehingga dampak yang ditimbulkan dari terjadinya banjir di Kota Jambi tidak hanya akan dirasakan oleh masyarakat lokal saja, melainkan juga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi Provinsi Jambi secara keseluruhan

Selain itu, masalah drainase yang kerap tidak memadai, perubahan fungsi lahan, serta luas ruang terbuka hijau yang masih kurang dari standar ideal sebuah kota menjadi penyebab utama terjadinya genangan air yang berkepanjangan. Akibatnya, masyarakat Kota Jambi mau tidak mau harus selalu siap dalam menghadapi risiko banjir yang tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi

juga dapat merusak infrastruktur serta mengancam keselamatan jiwa. Situasi ini menegaskan akan pentingnya upaya mitigasi yang lebih efektif dalam menangani persoalan banjir di daerah ini.

Tabel 1.3 Rekapitulasi Kejadian Banjir di Kota Jambi

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Jumlah
Kejadian Banjir	6	-	6	1	4	2	19

Sumber: BPBD Provinsi Jambi

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa permasalahan banjir yang terjadi setiap tahunnya di Kota Jambi memerlukan perhatian yang lebih serius dan menyeluruh dari Pemerintah Provinsi Jambi. Data yang tersedia menunjukkan situasi yang sangat krusial dan membutuhkan penanganan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi. Meskipun Kota Jambi sangat rentan terhadap bencana, namun wilayah ini masih belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang berfungsi secara khusus di Kota Jambi, yang mana keberadaan instansi tersebut sebenarnya sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap situasi darurat pada suatu wilayah.

Mengingat kompleksitas permasalahan banjir yang terjadi, maka penanganannya tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi pemerintah saja, melainkan diperlukan suatu pendekatan terpadu yang melibatkan kolaborasi erat antar berbagai pemangku kepentingan atau *stakeholder* serta peran masyarakat sebagai pendukung utama dalam upaya tersebut. Beberapa instansi kunci yang perlu dilibatkan dalam upaya mitigasi bencana banjir ini antara lain Dinas BPBD, Dinas Damkarta, Dinas Sosial, Dinas PUPR, serta BMKG.

Masing-masing instansi tersebut memiliki peran yang sangat penting dan

saling melengkapi dalam upaya mitigasi bencana di Kota Jambi. BPBD, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, bertanggung jawab atas penanggulangan bencana pada semua tahap, termasuk sebagai koordinator dalam perencanaan dan pelaksanaan tanggap darurat. Dinas Damkarta, berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 3 Tahun 2017, berfokus pada penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya, khususnya dalam penyelamatan dan evakuasi korban. Dinas Sosial, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2019, bertugas menyusun rencana program dan anggaran, serta menyediakan bantuan logistik dan pengelolaan pengungsi, memastikan kebutuhan dasar korban terpenuhi selama tanggap darurat hingga pemulihan. Dinas PUPR, sesuai dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2018, bertugas menangani masalah banjir dengan melibatkan OPD teknis terkait dalam bentuk tim. Sementara itu, Dalam kondisi rawan bencana, Stasiun BMKG berdasarkan peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 memiliki tugas penting untuk memberikan layanan informasi MKG serta menyampaikan informasi tersebut secara cepat, tepat, akurat, luas jangkauannya dan mudah dipahami.

Kolaborasi antar instansi ini menjadi sangat penting untuk menangani situasi mitigasi banjir secara menyeluruh dan efektif. Kerjasama yang terkoordinasi akan memungkinkan penanganan yang lebih efisien. Melalui kolaborasi dari kelima instansi pemerintahan tersebut, masyarakat diharapkan dapat memiliki akses yang memadai terhadap kelangsungan hidup mereka, terutama saat musim penghujan tiba yang cenderung menyebabkan banjir.

Berdasarkan informasi yang tersedia, fenomena banjir yang masih kerap terjadi mengindikasikan bahwa penanganan yang dilakukan belum mencapai efektivitas yang diharapkan. Meskipun pemerintah daerah setempat telah berupaya keras dalam mengatasi permasalahan ini, namun berbagai tantangan besar seperti keterbatasan finansial maupun sumber daya manusia menjadi faktor penghambat pelaksanaan solusi yang komprehensif.

Setelah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, penulis menemukan sejumlah karya ilmiah relevan dengan topik yang sedang diteliti. Hal ini penting untuk memahami posisi penelitian dalam konteks yang sama, menghindari kesamaan objek, dan menyoroti perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Sehingga, penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Maulana et al., 2023) meneliti tentang *Collaborative Governance in The Management and Protection of The Batanghari River Basin in Jambi Province*. Studi ini menunjukkan bahwa pentingnya tata kelola kolaborasi dalam pengelolaan DAS Batanghari untuk memahami interaksi antara pemangku kepentingan yang berbeda dalam mencapai tujuan bersama dan mengurangi konflik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kunci kolaborasi meliputi ilmu pengetahuan, kepemimpinan, pengalaman, dukungan politik dan finansial, serta pentingnya komitmen semua pihak untuk pengelolaan sumber daya air yang efektif.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Arif et al., 2021) meneliti tentang Kerentanan Masyarakat Perkotaan Terhadap Banjir di Kelurahan Legok,

Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kerentanan fisik dan sosial-ekonomi masyarakat terhadap banjir di Kelurahan Legok , dengan hasil yang menunjukkan kedalaman banjir dan karakteristik demografis dari populasi yang terdampak akibat topografi rendah, penyempitan sungai, dan saluran tersumbat. Temuan ini menekankan pentingnya mitigasi bencana yang lebih efektif untuk mengurangi dampak banjir.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh (Yamali et al., 2019) meneliti tentang Analisis Sistem Drainase Untuk Menanggulangi Banjir pada Kecamatan Jambi Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem drainase di wilayah penelitian seringkali mengalami genangan, terutama selama musim penghujan. Dengan menganalisis kapasitas saluran drainase menggunakan metode distribusi, yang menemukan bahwa tercatatnya debit air yang melebihi kapasitas saluran, terutama di hilir dan tengah, akibat penumpukan endapan dan sampah. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan perbaikan dimensi saluran drainase untuk meningkatkan kapasitas dan mengurangi risiko banjir di daerah tersebut.

Melihat beberapa penelitian terdahulu seperti yang dituliskan diatas, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan fokus dibandingkan dengan ketiga penelitian sebelumnya. Yang mana pada penelitian tersebut berfokus pada tata kelola kolaboratif di dalam pengelolaan DAS Batanghari, kerentanan fisik dan sosial-ekonomi masyarakat terhadap banjir, serta analisis sistem drainase, yang meskipun penting, akan tetapi ketiga penelitian tersebut tidak mencakup aspek kolaborasi yang berperan dalam mitigasi banjir.

Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada kolaborasi pemerintah daerah dalam mitigasi bencana banjir secara spesifik di Kota Jambi, dengan menganalisis faktor kendala yang mempengaruhi efektivitas kolaborasi. Dengan demikian, penelitian ini berusaha mengisi kekosongan dalam literatur dengan menawarkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kolaborasi antar instansi beserta kendala yang dihadapi dalam konteks yang lebih lokal.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengusulkan judul penelitian yaitu **“Kolaborasi Pemerintah Daerah Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kota Jambi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menyimpulkan dan menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kolaborasi Pemerintah Daerah dalam mitigasi bencana banjir di Kota Jambi?
2. Apa yang menjadi kendala dalam terjalannya kolaborasi mitigasi bencana banjir di Kota Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kolaborasi Pemerintah Daerah dalam mitigasi bencana banjir di Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam upaya

mitigasi bencana banjir di Kota Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan teori kolaborasi khususnya dalam konteks mitigasi bencana, dan memberikan pemahaman mendalam tentang peran, fungsi, serta kendala pada kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mitigasi banjir di Kota Jambi. Selain itu, penelitian ini diharapkan pula untuk dapat membantu pengembangan kapasitas dan kapabilitas instansi terkait dalam menjalankan program mitigasi banjir yang lebih efektif serta memberikan masukan bagi penelitian lanjutan di bidang ini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan kolaborasinya dalam memitigasi bencana banjir yang terjadi dan mengidentifikasi kelemahan maupun kekurangan yang ada sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan pada kegiatan yang dilakukan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Daerah terkait dengan penanggulangan banjir di Kota Jambi, seperti kebijakan tentang tata ruang, infrastruktur, dan edukasi/pelatihan masyarakat tentang bagaimana cara-cara yang perlu dilakukan dalam menghadapi bencana banjir, guna untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

1.5 Landasan Teori

Dalam studi ilmu pemerintahan, pemahaman kolaborasi antar pemangku kepentingan dan konsep mitigasi bencana sangat penting. Studi ini menekankan pada sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan penanggulangan bencana. Pada studi Ilmu Pemerintahan kolaborasi yang efektif dianggap dapat memperkuat kapasitas dan sumber daya, sehingga mitigasi dapat dilakukan secara terintegrasi. Dengan menerapkan teori kolaborasi, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan peran instansi dalam merespons bencana dan meminimalkan dampak dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana (Ansell & Gash, 2008).

1.5.1 Kolaborasi

Kolaborasi diartikan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan secara bersama oleh berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sama. Berkenaan dengan ini, O'Leary dan Bingham dalam (Sudarmo, 2015) mendefinisikan kolaborasi sebagai konsep yang menggambarkan proses kegiatan dan pelaksanaannya dengan melibatkan beberapa organisasi untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat dipecahkan atau sulit dipecahkan oleh satu organisasi secara individu.

Menurut (Dorisman et al., 2021), proses kolaborasi digunakan untuk melihat keterlibatan dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, baik mencakup kerja individu maupun kerja tim. Kolaborasi diharapkan menghasilkan inovasi, terobosan, dan prestasi memuaskan, serta mendorong perkembangan organisasi dan mewujudkan visi bersama dalam lingkungan yang kompleks.

Sementara menurut pendapat (Schöttle et al., 2014) kolaborasi merupakan hubungan antar organisasi yang memiliki visi bersama untuk membentuk organisasi proyek bersama dengan struktur yang disepakati bersama dan budaya proyek baru yang dikembangkan secara kolaboratif, berdasarkan kepercayaan dan transparansi. Tujuannya adalah untuk secara kolektif meningkatkan nilai bagi pihak penerima manfaat dengan menyelesaikan masalah bersama melalui proses interaktif yang direncanakan bersama, serta dengan berbagi tanggung jawab, risiko, dan manfaat di antara para pemangku kepentingan. Adapun indikator-indikator kuat yang paling mempengaruhi kolaborasi diantaranya ialah:

1. Komunikasi

Kolaborasi yang efektif memerlukan dukungan komunikasi yang baik. Sukses dalam kolaborasi tidak hanya melibatkan pembagian tugas, tetapi juga menumbuhkan komitmen yang tulus untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks penelitian ini, antar stakeholder dapat menggunakan media sosial, grup WhatsApp, atau aplikasi komunikasi lainnya untuk berbagi informasi terkini terkait cuaca, status bencana, dan langkah-langkah mitigasi.

2. Komitmen

Komitmen adalah kunci utama kesuksesan kolaborasi. Meskipun kolaborasi memerlukan tingkat komitmen yang tinggi, jika dilaksanakan dengan baik, maka kolaborasi dapat menghasilkan komitmen bersama. Dengan kata lain, keberhasilan kolaborasi bergantung pada seberapa besar komitmen yang dibawa oleh setiap pemangku kepentingan yang terlibat.

3. Saling Percaya

Kepercayaan merupakan pondasi penting dalam setiap bentuk kolaborasi. Kepercayaan sebagaimana mencakup keyakinan terhadap cara suatu pekerjaan dilaksanakan, integritas dari setiap kata yang diucapkan, hingga transparansi atas hasil yang dicapai. Tanpa adanya kepercayaan, hubungan kerja sama akan rentan terhadap konflik, kesalahpahaman, dan keraguan antar pihak yang terlibat.

4. Transparansi / Pertukaran Informasi

Transparansi atau pertukaran informasi adalah prinsip yang memastikan setiap orang memiliki akses dan kebebasan untuk mendapatkan informasi. Dengan adanya transparansi, kolaborasi akan mendapatkan manfaat positif, meningkatkan akuntabilitas para pemangku kepentingan, dan memastikan pengawasan terhadap pemegang otoritas berjalan dengan efektif. Adapaun tindakan yang perlu dilakukan dalam konteks mitigasi bencana, yaitu dengan melakukan evaluasi bersama setelah bencana terjadi untuk membahas apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki, serta transparansinya dalam penggunaan dana bantuan.

1.5.2 Konsep Mitigasi Bencana

Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya mulai dari pencegahan sebelum suatu bencana terjadi sampai dengan penanganan usai suatu bencana terjadi guna untuk mengidentifikasi risiko, meningkatkan kesadaran akan ancaman bencana, serta merencanakan langkah-langkah penanggulangan (Adminbpbd, 2020).

Sedangkan, menurut (Tysara, 2023) bencana diartikan sebagai peristiwa

yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, disebabkan oleh faktor alam, non-alam, atau aktivitas manusia. Bencana dapat mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Upaya mitigasi terbagi dua yaitu mitigasi struktural dan nonstruktural. Mitigasi struktural melibatkan perubahan fisik pada bangunan atau lingkungan untuk mengurangi dampak bencana. Sementara itu, mitigasi non-struktural mencakup kegiatan non-fisik seperti sosialisasi, peningkatan kesadaran, pendidikan persiapan bencana, serta perencanaan evakuasi dan penetapan titik temu keluarga (Aulia et al., 2021)

Dalam kegiatan mitigasi, terdapat tiga tahapan utama dalam siklus mitigasi bencana yang terdiri dari pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana. Ketiga siklus ini bertujuan untuk mengurangi risiko, menangani dampak, dan memulihkan kondisi masyarakat setelah bencana. Pada tahap pra-bencana, dilakukan mitigasi melalui perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Pada saat bencana terjadi, dilakukan tahap tanggap darurat yang melibatkan evakuasi, pemberian bantuan medis, dan distribusi logistik. Setelah itu, pada tahap pasca-bencana, dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan kondisi masyarakat (Multazam, 2024).

Kegiatan mitigasi bencana, pada dasarnya bersifat rutin dan berkelanjutan. Artinya, mitigasi harus dilakukan secara teratur sebelum bencana terjadi lagi dan dengan intensitas yang lebih besar dari yang diperkirakan. Untuk menetapkan strategi mitigasi yang tepat dan akurat, maka perlu dilakukannya kajian risiko (*risk assessment*). Berikut adalah beberapa strategi atau langkah-langkah yang perlu

diambil untuk mencapai keberhasilan dalam upaya mitigasi bencana menurut (Rahmayanti, 2020) :

1. Pemetaan

Pemetaan menjadi langkah awal yang sangat krusial, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana. Hasil pemetaan berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan rencana penanggulangan serta menentukan prioritas tindakan yang akan dilakukan dalam menghadapi potensi bencana.

2. Pemantauan

Tahapan ini berkaitan erat dengan hasil pemetaan sebelumnya. Pemantauan berkelanjutan memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi bencana, sehingga langkah penyelamatan dan evakuasi dapat direncanakan dengan lebih efektif.

3. Penyebaran Informasi

Informasi terkait gejala, pencegahan, dan penanganan bencana perlu disampaikan secara luas dan berkelanjutan melalui berbagai saluran komunikasi, baik media cetak, elektronik, maupun digital. Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya bencana.

4. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi khususnya dalam konteks mitigasi bencana ialah mencakup penyuluhan, edukasi kebencanaan, serta integrasi pengetahuan mitigasi dalam kurikulum pendidikan formal maupun informal. Sosialisasi

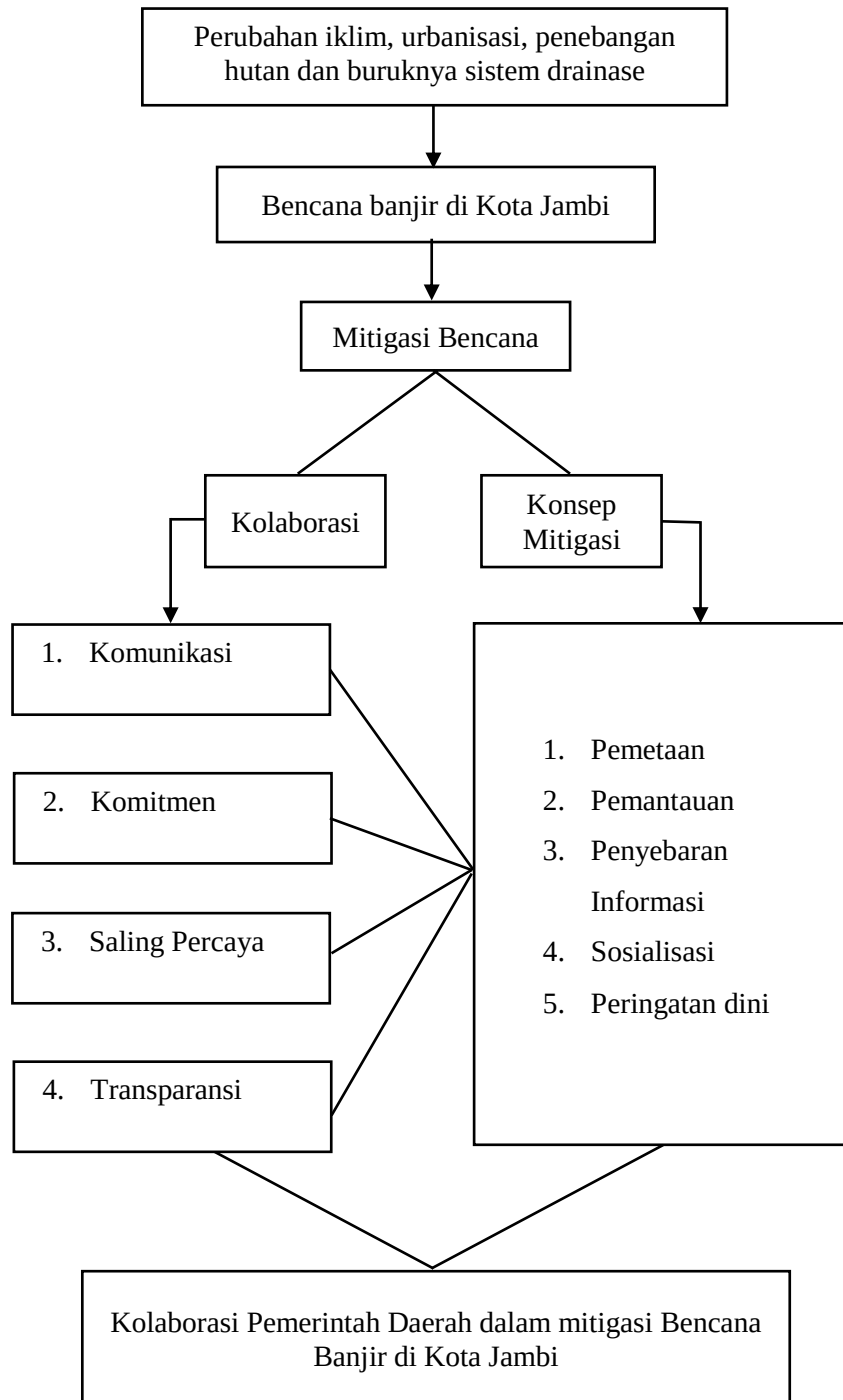
bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat memahami langkah-langkah mitigasi serta berperan aktif dalam mengurangi risiko bencana.

5. Peringatan Dini

Sistem peringatan dini memungkinkan respons yang cepat dan tepat guna dalam menghadapi bencana yang akan terjadi. Hal ini sangat penting untuk meminimalisasi kerugian fisik, korban jiwa, serta kerusakan lingkungan.

Secara keseluruhan, penerapan strategi mitigasi yang menyeluruh dan terpadu tidak hanya meningkatkan kesiapsiagaan infrastruktur dan kelembagaan, tetapi juga membentuk masyarakat yang lebih tangguh dan resiliensi dalam menghadapi bencana. Tak hanya itu, dampak lainnya juga dapat terlihat pada pengurangan signifikan terhadap kerugian ekonomi, korban jiwa, serta trauma sosial yang ditimbulkan oleh bencana.

1.6 Kerangka Pikir



1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, ini dikarenakan peneliti ingin memberikan penjelasan secara komprehensif terkait bagaimana fenomena atau kondisi sebenarnya yang terjadi selama penelitian. (Bogdan dan Taylor, 1975) memaparkan bahwa penelitian kualitatif diartikan sebagai metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan berdasarkan perilaku orang yang dapat diamati, dengan berfokus pada konteks individu secara holistik atau keseluruhan.

Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data atau informasi melalui wawancara, observasi dan dokumentasi untuk menjelaskan masalah yang ditemukan di lapangan. Melalui jenis penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan gambaran rinci tentang mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di Provinsi Jambi terhadap korban banjir di Kota Jambi, termasuk kendala-kendala yang dihadapi para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Menurut Nasution dalam (Gaspar et al., 2023) lokasi penelitian diartikan sebagai tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat di observasi. Penelitian ini dilakukan sebagaimana dengan judul yang ditetapkan yaitu berlokasi di wilayah Kota Jambi.

1.7.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus dengan melihat bagaimana mitigasi bencana yang dilakukan oleh beberapa pemangku kepentingan di Provinsi Jambi terhadap permasalahan banjir di Kota Jambi, yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana kolaborasi tersebut dilakukan, serta menganalisis kendala yang dihadapi dalam mengatasi permasalahan banjir yang sering terjadi di wilayah tersebut.

1.7.4 Sumber Data

Mencari dan memecahkan masalah adalah tujuan utama penelitian. Dengan data yang akurat dan relevan, setiap masalah dapat diselesaikan. Sumber data yang baik akan menggambarkan konteks dengan menunjukkan objektivitas terkait masalah yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat dua jenis data yang akan diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer diartikan sebagai kumpulan data dan informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu pihak-pihak yang dijadikan subjek utama dalam penelitian (Balaka, 2022). Untuk mendukung penelitian kualitatif, penelitian ini akan melibatkan perolehan data melalui wawancara dan observasi dengan beberapa instansi terkait yaitu, dinas BPBD, Damkarta, Dinsos, PUPR, serta BMKG.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dimaknai dengan informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan laporan oleh orang di luar peneliti atau dari sumber tidak

langsung seperti berbagai literatur, terutama yang berkaitan dengan suatu fenomena dan teori-teori lain terkait permasalahan yang berdampak pada wilayah penelitian (Supomo, 2009).

Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah dokumen-dokumen pemerintah, e-book, jurnal, artikel, studi kepustakaan, juga referensi lain yang berkaitan dan menjadi pedoman dalam penelitian ini.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik yang digunakan penelitian ini dalam menentukan informan adalah teknik *purposive sampling*. Menurut pendapat Notoatmodjo dalam (Kumara, 2018) *Purposive sampling* merupakan metode pemilihan sampel dalam penelitian yang secara sengaja memilih partisipan dengan karakteristik tertentu untuk memperoleh data yang mendalam dan relevan dalam menjawab pertanyaan penelitian yang spesifik, terutama untuk fenomena atau kasus-kasus spesifik. Adapun informan yang peneliti butuhkan terkait objek penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Seksi Pencegahan Dinas BPBD Provinsi Jambi.
- b. Kepala Bidang Pencegahan Dinas Damkarta Kota Jambi.
- c. Kepala Bidang Penanganan Bencana Dinas Sosial Kota Jambi.
- d. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Jambi.
- e. Ketua Tim Bidang Data dan Informasi BMKG Sultan Thaha Jambi.
- f. Masyarakat dalam ruang lingkup lokasi penelitian.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan. (Rahardjo, 2011). Berikut ini adalah bentuk teknik pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti:

a. Wawancara

Wawancara diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan narasumber melalui dialog terstruktur, baik secara langsung maupun melalui telepon atau online. Tujuannya adalah untuk memperoleh data rinci mengenai pendapat, pengalaman, dan persepsi narasumber terkait pelaksanaan kegiatan mitigasi bencana banjir di Kota Jambi yang dilakukan berdasarkan kolaborasi antar Pemerintah Daerah yang terlibat.

b. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan langsung secara sistematis terhadap gejala yang diteliti, sehingga penulis dapat mengamati kegiatan atau aktivitas berdasarkan kondisi nyata pada lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di wilayah yang rentan terhadap bencana banjir untuk mencatat interaksi pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat, serta memverifikasi data yang dikumpulkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen seperti teks, gambar, audio, video, atau artefak lainnya. Adapun dokumen dalam penelitian ini ialah berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Peraturan

Walikota terkait mitigasi bencana, data wilayah terdampak, rekapitulasi bencana banjir, dan notulen wawancara penelitian.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan serangkaian langkah sistematis dan terstruktur yang digunakan untuk mengorganisasikan, mengelola, dan memahami makna dari data yang dikumpulkan, sehingga dapat menghasilkan temuan yang kredibel, valid, dan dapat diandalkan, serta untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan (Hardani et al., 2020).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam (Silalahi, 2009), yang mana pada teknik ini terdapat tiga unsur kegiatan analisis yang terjadi secara bersamaan, diantaranya yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data dapat diartikan sebagai tahap seleksi yang menekankan pada abstraksi, penyederhanaan, serta transformasi data kasar dari catatan yang tertulis di lapangan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan tahap pengumpulan informasi terstruktur yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.

c. *Conclusion Drawing/Verification* (Menarik Kesimpulan)

Penarikan dan verifikasi kesimpulan merupakan langkah penting dalam analisis data. Kesimpulan awal hanyalah bersifat sementara dan harus didukung oleh bukti yang kuat. Jika bukti tersebut dianggap valid dan konsisten setelah

pengumpulan data tambahan, maka kesimpulan dapat dianggap kredibel dan dapat diandalkan.

1.7.8 Keabsahan Data

Triangulasi diketahui sebagai teknik untuk memeriksa keabsahan data yang menggunakan sesuatu yang lain pada saat peneliti membandingkan hasil wawancaranya dengan objek penelitian (Moleong, 2004). Selain memverifikasi keabsahan, triangulasi juga memperkaya data dan menguji akurasi penafsiran, sehingga bersifat refleksif.

Denzin dalam (Moleong, 2004) mengidentifikasi empat jenis triangulasi yaitu, sumber, metode, peneliti, dan teori. Diantara keempat jenis triangulasi tersebut, yang digunakan peneliti pada penelitian ini hanyalah teknik triangulasi sumber. Adapun pendapat Patton dalam (Hadi, 2016) Triangulasi dengan sumber adalah membandingkan dan memverifikasi informasi yang diperoleh melalui waktu dan instrumen berbeda dalam penelitian kualitatif. Untuk mencapai keyakinan atau kepercayaan tersebut, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Membandingkan data observasi dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang seseorang sampaikan di hadapan publik dengan apa yang mereka ungkapkan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang orang-orang katakan tentang status investigasi dengan apa yang ia katakan secara konsisten.
- d. Membandingkan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai golongan.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.